

### Informasi Organisasi

**Nama Organisasi:**

BALANG INSTITUTE

**Kategori Organisasi:**

- Organisasi Masyarakat (Agama/Pemuda/Parpol/Perempuan/Veteran)
- Organisasi Basis (Kel. Tani/Nelayan/Pengelola Hutan/Masyarakat Adat/Koperasi)
- LSM/NGO Lingkungan Hidup/Konservasi
- LSM/NGO Pengembangan Ekonomi dan Masyarakat
- Organisasi Sosial/Kesehatan Masyarakat
- Lembaga Advokasi/Bantuan Hukum
- Lembaga Pendidikan/Penyuluh/Penyadaran Masyarakat
- Organisasi Profesional/Kelompok Intelektual
- Lembaga Penelitian/Kajian/Universitas
- Bagian dari perusahaan yang bergerak untuk kepedulian sosial dan lingkungan (CSR)
- Media

**Nama Penanggung Jawab Organisasi:**

Adam Kurniawan

**Nama Koordinator Proyek:**

Andi Adriadi

**Alamat Email Organisasi:**

info@balanginstitut.org

**Alamat Organisasi :**

Balla Temboka, Jl. Bolu No.11, Maricaya, RT 2, RW II, Kel. Letta, Kec. Bantaeng, Kab. Bantaeng. (92411)

**No Telepon Organisasi :**

0413 2526 109

**No Fax Organisasi (jika ada) :**

0413 2526 109

**Website Organisasi (jika ada) :**

[balanginstitut.org](http://balanginstitut.org)

**Jumlah Staf tetap:**

- a. Laki-laki :  
13 orang
- b. Perempuan : 2  
2 orang

**Akte Pendirian Organisasi:**

*Lengkapi dengan copy 1 rangkap jika telah memiliki*

- Ada  
 Tidak

**Sejarah, Visi dan misi Organisasi:**

*Jelaskan secara singkat tentang sejarah dan misi organisasi anda, pengalaman yang relevan dengan proyek yang diusulkan berikut nama donor dan jumlah anggaran yang dikelola, maksimal 250 kata.*

Balang didirikan Februari 2010 dengan Akta Notaris Nomor 87 oleh Notaris PPAT Syahrir Amri, SH pada tanggal 25 Mei 2010. Gagasan awal pendirian Balang adalah “Memastikan akses masyarakat terhadap pengelolaan sumber daya alam yang adil dan berkelanjutan”. Di awal berdirinya, gagasan tersebut diaktualkan dengan mendampingi pembentukan dan pendidikan kelompok tani hutan di dataran tinggi Lompobattang.

Seiring waktu, Balang mengembangkan isu melalui penelitian aksi nyata dan pendampingan aktif terhadap masyarakat yang tinggal di pinggiran hutan. Kegiatan yang dilakukan Balang bersama masyarakat antara lain, memajukan pengelolaan Hutan Desa dan Hutan Kemasyarakatan, konservasi satwa liar berbasis masyarakat, pemetaan partisipatif untuk menyusun rencana tata guna lahan, implementasi imbal jasa lingkungan, serta mendorong terbitnya Peraturan Daerah (perda) tentang pengakuan masyarakat adat.

Keseluruhan kerja tersebut merupakan upaya mendorong terbangunnya kesadaran yang kritis, inovatif dan strategis dengan menghargai tradisi kultur dan kearifan lokal yang berlaku dalam masyarakat. Bersama masyarakat Balang mendorong pengambilan kebijakan memperhatikan hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam. Atas kerja aktif tersebut, Balang meluaskan wilayah kerjanya ke kabupaten Bulukumba, Jeneponto, Barru, dan Gowa serta tidak menutup kemungkinan melangkah ke wilayah lain. Tuntutan kerja yang semakin meluas, mendorong perubahan nama organisasi menjadi Balang Institute pada tahun 2012.

Balang yang berarti sungai dalam bahasa Makassar, mengukuhkan dirinya untuk bekerja secara kolaboratif dengan menempatkan masyarakat sebagai subjek yang mengubah pengetahuan menjadi tindakan untuk mendorong terpenuhinya hak-hak masyarakat dalam pengelolaan sumber daya alam yang berkelanjutan.

### Penilaian Kelayakan

Dana CEPF hanya dapat digunakan mendukung kegiatan-kegiatan yang sesuai dengan tujuan CEPF dan tidak dapat dipergunakan dalam beberapa kegiatan tertentu. Informasi lebih lanjut tentang Dana CEPF, silakan dilihat di website [www.wallacea.org](http://www.wallacea.org), atau menghubungi:

- email : [hibah.wallacea@burung.org](mailto:hibah.wallacea@burung.org)
- telepon: 0811 1975 836 (Rini Suryani - *Grant Management Officer*)

**Apakah organisasi anda berada di bawah kendali/bertanggung kepada/dibiayai oleh pemerintah?**

- Ya  
 Tidak

**Apakah aktivitas di dalam proyek ini termasuk melakukan pembelian tanah?**

- Ya  
 Tidak

**Apakah aktivitas dalam proyek ini akan melibatkan pemindahan atau perubahan atas suatu objek atau bangunan yang bernilai budaya (termasuk benda bergerak dan tidak bergerak, situs, struktur, dan lanskap yang mengandung nilai arkeologi, paleontologi, sejarah, arsitektur, agama, estetika, atau nilai budaya lainnya)?**

- Ya  
 Tidak

**Apakah proyek ini akan melibatkan pemindahan penduduk atau aktivitas lain yang termasuk dalam kategori pemindahan paksa?**

- Ya  
 Tidak

## Penjelasan Proyek

### Judul Proyek :

Meningkatkan layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati di kawasan hutan lindung Lompobattang melalui kebijakan program para pihak yang kolaboratif.

### Lokasi Proyek:

- a. Negara : Indonesia
- b. Provinsi : Sulawesi Selatan
- c. KBA yang terdampak : Bawakaraeng-Lompobattang
- d. Kabupaten/kota : Bantaeng
- e. Desa : Pattaneteang, Kec. Bantaeng

### Durasi Proyek:

*Tuliskan jangka waktu perkiraan proyek Anda dalam hitungan bulan.*

Dua belas bulan

### Arahan Strategis dari Profil Ekosistem Wallacea CEPF:

- 1. Tindakan untuk mengatasi ancaman yang spesifik bagi spesies prioritas
- 2. Meningkatkan pengelolaan kawasan (KBA) yang dilindungi maupun yang tidak dilindungi
- 3. Mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan dan koridor prioritas
- 4. Memperkuat aksi berbasis masyarakat untuk melindungi spesies dan kawasan laut
- 5. Melibatkan sektor swasta sebagai peserta aktif dalam konservasi kawasan dan koridor prioritas, di bentang alam produktif, dan di seluruh Wallacea
- 6. Meningkatkan kapasitas masyarakat sipil untuk aksi konservasi yang efektif di Wallacea

### Jumlah Dana yang Diusulkan:

*Masukkan jumlah dana yang dimintakan kepada CEPF dalam Rupiah, dengan nilai tukar Rp13,000/USD*

Rp252,481,000,-

### Total Dana Proyek:

*Total dana proyek secara keseluruhan, termasuk di dalamnya yang diusulkan didanai oleh CEPF (dalam Rupiah)*

Rp. 252, 481,000

**Anggaran Proyek:**

Lampirkan rincian anggaran yang diusulkan dalam format excel seperti yang telah disediakan

Rincian Anggaran terlampir

**Aspek Kerangka Pengaman**

RIT dapat meminta pemohon untuk memberikan informasi tambahan dan dokumentasi proyek jika proyek tersebut memiliki potensi untuk memicu Kerangka Pengaman (*Safeguards*). Informasi lebih lanjut tentang aspek Kerangka Pengaman, silakan

- email : [hibah.wallacea@burung.org](mailto:hibah.wallacea@burung.org)
- telepon: 0811 1975 836 (Rini Suryani - *Grant Management Officer*)

**Aspek Lingkungan**

Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang mungkin memiliki dampak buruk terhadap lingkungan?

- Ya  
 Tidak

**Keterangan:**

Berikan penjelasan mengenai dampak terhadap lingkungan dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.

**Aspek Sosial**

Apakah proyek yang diusulkan melibatkan kegiatan yang cenderung memiliki dampak buruk/negatif pada masyarakat lokal?

- Ya  
 Tidak

**Keterangan:**

Berikan penjelasan mengenai dampak sosial dan mitigasinya jika jawaban pertanyaan di atas adalah Ya.

**Proposal**

Bagian ini untuk memberikan gambaran dari konsep proyek.

**A. Alasan Proyek:**

*Menjelaskan alasan bagi aksi konservasi (karena adanya ancaman dan atau peluang) yang ingin dilakukan dan apa yang akan terjadi jika proyek ini tidak dilaksanakan, maksimal 300 kata. Secara rinci:*

- Nyatakan masalah yang terjadi pada jenis (*species*) dan atau KBA (*site*) dengan menjelaskan secara rinci mengikuti standar penulisan jurnalistik (5W 1H). Untuk memenuhi batasan jumlah kata, hindari menjelaskan semua masalah dan fokus hanya pada masalah yang akan ditangani oleh proyek.

- *Hindari menyatakan masalah sebagai asumsi (bukan fakta) dengan cara memperjelas intensitasnya, meliputi volume, frekuensi, sebaran, dampak, dan pihak yang terlibat.*
- *Lakukan analisis masalah hingga teridentifikasi akar-akar masalah yang langsung bisa ditangani melalui intervensi proyek.*

Penyebab utama tekanan terhadap Hutan Desa Pattaneteang adalah penanaman kopi dari 29 ha (2010) menjadi 80 ha (2015) dan cengkeh 3.5 ha (750 pohon) dalam kawasan hutan dua tahun terakhir dan alih fungsi kebun campur yang didominasi kopi menjadi kebun sayur seluas 4.5 ha di luar kawasan hutan.

Areal Penggunaan Lain (APL) di desa Pattaneteang seluas 902 ha meliputi permukiman, infrastruktur dan lahan pertanian. Seluruh petani menghimpun diri dalam 17 kelompok tani. Kelompok Tani Sipakainga dan Pucuk Mekar tiga tahun terakhir mulai mengembangkan tanaman sayur, 2.5 ha oleh kelompok tani Sipakainga dan 2 ha oleh kelompok tani Pucuk Mekar. Di saat bersamaan petani yang menanam kopi dalam hutan desa meningkat.

Terbatasnya pengetahuan petani dalam memanfaatkan Hasil Hutan Bukan Kayu (HHBK) menyebabkan penanaman kopi dan cengkeh dalam hutan menjadi pilihan untuk mendapatkan penghasilan tambahan. Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) sebagai pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa (HPHD) melalui SK Gubernur Sulsel NO. 3804/XI/TAHUN 2010, vakum sejak 2014. Dengan demikian aktivitas penanaman kopi dan cengkeh dalam hutan menjadi tidak terkontrol.

Di luar hutan, tanaman jangka pendek menjadi pilihan agar cepat mendapatkan hasil. Jika penanaman kopi dan cengkeh di dalam hutan tidak terkontrol, tekanan terhadap hutan semakin besar. Akibatnya, Daerah Tangkapan Air (DTA), habitat anoa dan satwa liar lainnya dalam hutan terganggu.

Untuk mengatasi tekanan terhadap hutan, perlu menguatkan kembali BUMDes agar mampu menyusun dan menegakkan aturan main pengelolaan hutan yang lestari. HHBK berupa madu dan kopi ditingkatkan nilai jualnya dengan perbaikan kualitas dan perluasan pasar. Untuk mencegah perluasan tanaman sayur di APL kelompok tani meluas hingga masuk ke dalam kawasan Hutan Desa harus didukung menyusun Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok Tani (RDK-KT) yang mengutamakan pengelolaan kebun campur organik yang produktif dan berkelanjutan.

Perencanaan pengelolaan hutan desa yang lestari oleh BUMDes dan perencanaan kelompok tani akan diperkuat melalui Rencana Tata Ruang Desa (RTR-Desa) yang terintegrasi dengan Rencana Pembangunan pemerintah yang kolaboratif dari tingkat desa hingga kabupaten.

#### **B. Apakah dampak dari pelaksanaan Proyek ini bagi:**

*Jelaskan untuk masing-masing huruf maksimal 100 kata.*

- a. Jenis-jenis prioritas yang terdapat di dalam KBA

Hasil identifikasi potensi oleh Balang, masyarakat dan Fakultas kehutanan Unhas dalam rangka penyusunan Rencana kerja Hutan Desa (RKHD) di areal Hutan Desa Pattaneteang menemukan tujuh jenis burung, Seriti (*Collocalia esculenta*), Kelelawar, Walet (*Collocalia fuchipaga*), Kutilang (*Pycnonotus cafer*), Burung Madu (*Aethopyga malarensis*), Elang (*Hinecopernis longicauda*), Salessere (*Hirundo tahitica*), dan Pipit (*Sturnus sp.*). Tujuh jenis kupu-kupu yang berjumlah 62 spesies, dan dua jenis belalang (coklat dan hijau), anoa, ular, kadal coklat, tupai, lebah, kuskus, tongali, musang, luwak, dan monyet hitam (*Macaca Maura*). Mengurangi tekanan terhadap hutan akan berdampak pada terjaganya daerah tangkapan air dan ekosistem satwa liar dalam hutan.

b. Pengelolaan KBA yang lebih baik

Meningkatkan pengetahuan petani dalam mengelola HHBK dan kebun campur organik akan berdampak pada terkontrolnya penanaman kopi dan cengkeh dalam kawasan hutan. BUMDes dan Kelompok Tani yang kuat, yang memiliki kemampuan menyusun dan menjalankan rencana pengelolaan hutan dan lahan yang lestari serta terintegrasi dengan pembangunan yang kolaboratif dari tingkat desa hingga kabupaten akan membuat pengelolaan hutan desa menjadi agenda bersama, antara petani dan pemerintah desa. Dengan demikian hutan desa sebagai DTA dan ekosistem satwa liar akan mendapatkan porsi dalam pembahasan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) dan Alokasi penganggaran desa.

c. Masyarakat di sekitar KBA dan para pihak terkait lainnya

Bagi masyarakat, terjaganya DTA dan ekosistem satwa liar melalui pengelolaan hutan dan lahan yang lestari membuka ruang untuk terlibat dalam musyawarah pembangunan desa, memperkuat pengetahuan dan keterampilan dalam pengelolaan HHBK dan pengelolaan kebun dengan menerapkan skema intensifikasi lahan. Dampaknya masyarakat sekitar hutan akan memiliki kelembagaan yang kuat, pengelolaan HHBK dan kebun yang produktif akan memberikan penambahan pendapatan. Pemerintah desa akan dimudahkan menyusun rencana dan melaksanakan pembangunan desa yang partisipatif dan tepat sasaran. Dinas kehutanan (Dishut) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) lebih mudah menjalankan tugas pelestarian hutan dan memberdayakan masyarakat sekitar hutan. Begitupun para pihak lainnya yang berkepentingan akan memudahkan perancangan kebijakan program yang sesuai dengan rencana strategis desa yang telah disusun kedalam dokumen RTR-Desa

**C. Tujuan Proyek:**

*Menjelaskan tujuan akhir yang ingin dicapai oleh proyek ini, maksimal 50 kata.*

*Tujuan proyek harus berorientasi pada penyelesaian masalah yang telah dinyatakan dalam Alasan Proyek.*

Meningkatkan layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati di kawasan hutan lindung Lompobattang dengan memperkuat pengetahuan dan keterampilan

masyarakat dalam melaksanakan pengelolaan hutan dan lahan lestari yang terintegrasi dengan kebijakan program pemerintah yang kolaboratif.

**D. Keluaran Proyek:**

*Merupakan jawaban atas akar-akar masalah yang diidentifikasi dalam Alasan Proyek.*

1. Meningkatkan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan hutan dan lahan yang lestari.
2. BUMDes dan Kelompok Tani mampu menyusun dan melaksanakan rencana pengelolaan hutan dan lahan yang lestari.
3. Menyusun Rencana Tata Ruang Wilayah Desa yang terintegrasi dengan kebijakan program pemerintah yang kolaboratif.

**E. Aktivitas Proyek:**

<p><b>Keluaran 1</b> Pembukaan lahan pertanian dalam kawasan Hutan Desa tidak bertambah</p>	<p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. <i>Pelatihan pemetaan lahan garapan kelompok tani dan kawasan Hutan Desa</i></li> <li>2. Pembekalan tim BUMDes untuk pemetaan tata guna lahan dalam kawasan Hutan Desa</li> <li>3. Pemetaan tata guna lahan (dalam dan luar kawasan hutan)</li> <li>4. Lokakarya hasil pemetaan tata guna lahan dan rencana tata guna lahan</li> </ol>
<p><b>Keluaran 2</b> Pengembangan mata pencaharian masyarakat</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengembangan pola pertanian berkelanjutan melalui intensifikasi lahan pertanian</li> <li>2. Penerapan pembelajaran petani melalui Sekolah Lapang dan demplot percontohan pertanian berkelanjutan</li> <li>3. Pelatihan pemasaran produk olahan Kopi dan Madu</li> </ol>
<p><b>Keluaran 3</b> Meningkatnya kapasitas BUMDes, Kelompok Tani, Pemerintah Desa dalam menyusun dan mengimplemetasikan RTHD, RDK-KT dan RTR-Desa.</p>	<p>Aktivitas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyusunan RDK-KT disusun oleh 17 kelompok tani</li> <li>2. BUMDes bersama Pemerintah Desa dan masyarakat menyusun RTHD</li> <li>3. Konsultasi dan Penyusunan RTR-Desa yang mengacu pada RTHD dan RDK-KT</li> <li>4. Presentasi ke para pihak</li> </ol>

## Strategi dan Keberlanjutan Proyek

### Kaitan dengan Strategi Investasi CEPF:

*Terangkan kaitan antara proyek Anda dengan strategi investasi CEPF yang disajikan dalam Profil Ekosistem Wallacea. Jawaban hendaknya mengulas kaitan dengan arahan strategis dan prioritas investasi di dalam Profil Ekosistem Wallacea.*

Proyek ini berfokus pada upaya mendorong petani untuk mengembangkan alternatif mata pencaharian melalui pengelolaan sumber daya alam yang produktif dan berkelanjutan dengan mempraktekkan intensifikasi lahan di luar kawasan hutan, serta pengelolaan HHBK berupa kopi dan madu dari hutan desa, memperkuat BUMDes dan Kelompok tani untuk menyusun dan melaksanakan pengelolaan hutan dan lahan yang lestari, serta menghasilkan instrumen kebijakan pengelolaan sumber daya alam melalui penyusunan Rencana Tata Ruang (RTR) Desa yang mendukung peningkatan pendapatan petani dengan meningkatkan layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati hutan desa Pattaneteang yang merupakan bagian dari hutan lindung gunung Lompobattang. Dengan demikian kegiatan dan hasil yang dicapai proyek ini diyakini akan mendukung arahan strategis tiga yakni “Mendukung pengelolaan sumber daya alam berkelanjutan yang dilakukan oleh masyarakat di kawasan dan koridor prioritas.”

### Mitra kerja (*stakeholders*) dalam Proyek:

*Tuliskan setiap mitra yang akan terlibat langsung dalam pelaksanaan proyek ini serta para pihak lain yang akan berperan penting dalam pelaksanaan Proyek. Proyek sebaiknya dirancang untuk bersinergi dengan program sejenis dari pemerintah dan atau lembaga lain, sehingga berpotensi menghasilkan dampak yang lebih nyata.*

Nama Mitra Kerja	Peran dalam Proyek ini
1. Badan Usaha Milik Desa Pattaneteang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitra dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Tahunan Hutan Desa.</li><li>• Mitra dalam memperkuat kapasitas petani pengelola hutan desa.</li></ul>
2. Kelompok Tani di Desa Pattaneteang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitra dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Definitif Kebutuhan Kelompok tani</li><li>• Mitra dalam memperkuat kapasitas Kelompok Tani</li></ul>
3. Pemerintah Desa Pattaneteang	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitra dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Tata Ruang (RTR)</li><li>• Mitra dalam menyusun RTHD dan RDKK</li><li>• Mitra dalam memperkuat kapasitas BUMDes dan Kelompok Tani</li></ul>
4. Dinas Pertanian dan Peternakan Kab. Bantaeng	<ul style="list-style-type: none"><li>• Mitra dalam menyusun dan melaksanakan RDK-KT.</li><li>• Mitra dalam memperkuat kapasitas Kelompok Tani</li></ul>

5. Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Kab. Bantaeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitra dalam memperkuat kapasitas BUMDes</li> </ul>
6. Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Bantaeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitra dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Tahunan Hutan Desa.</li> <li>• Mitra dalam memperkuat kapasitas BUMDes</li> <li>• Mitra dalam memperkuat kapasitas petani pengelola hutan desa.</li> </ul>
7. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) Kab. Bantaeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitra dalam menyusun RTR Desa</li> <li>• Narasumber dalam workshop penyusunan RTR desa</li> </ul>
8. Badan Pelaksana Penyuluhan dan Ketahanan Pangan (BP2KP) Kab. Bantaeng	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitra dalam menyusun dan melaksanakan RDK-KT.</li> <li>• Mitra dalam memperkuat kapasitas Kelompok Tani</li> </ul>
9. Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) Jeneberang	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Mitra dalam menyusun dan melaksanakan Rencana Tahunan Hutan Desa.</li> <li>• Mitra dalam memperkuat kapasitas BUMDes</li> <li>• Mitra dalam memperkuat kapasitas petani pengelola hutan desa.</li> </ul>

**Pengarusutamaan gender dan inklusi sosial:**

*Bagaimana peranan laki-laki dan perempuan dalam kegiatan yang diusulkan (dengan memfokuskan pada kebutuhan perempuan)? Bagaimana strategi Anda agar kegiatan ini dapat memberikan dampak pada semua kelompok masyarakat, termasuk kelompok marginal.*

Di desa Pattaneteang, perempuan dan laki-laki terlibat aktif dalam aktivitas pertanian, bahkan perempuan lebih dominan dalam proses pemasaran (menjual) hasil-hasil pertanian. Perempuan cenderung kehilangan hak dalam pertemuan dan pelatihan-pelatihan kelompok tani, sebab keanggotaan kelompok tani berbasis kepala keluarga, sementara dalam tradisi setempat laki-laki adalah kepala keluarga. Dengan demikian proyek ini akan memberikan perhatian khusus pada perempuan dengan memastikan kehadiran perempuan pada setiap pertemuan minimal 30 persen.

Dalam pertemuan berskala desa seperti dalam penyusunan RPJMDes dan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbang) perempuan sudah mendapatkan porsi kehadiran yang cukup, yang perlu dimajukan adalah metode yang memastikan perempuan punya hak yang sama dalam menyampaikan pendapat dan pengaruh dalam pengambilan keputusan. Dengan demikian pada pertemuan tertentu misalnya dalam penyusunan RTR Desa, bila dianggap perlu dibuat pertemuan terpisah khusus untuk perempuan.

**Rencana keberlanjutan:**

*Jelaskan bagaimana strategi Anda agar bagian-bagian dari proyek ini atau hasil-hasilnya dapat dilanjutkan atau direplikasi setelah berakhirnya proyek baik oleh lembaga Anda sendiri maupun pihak lain.*

Untuk memastikan berlanjutnya kegiatan maupun hasil-hasil yang dicapai dalam proyek ini seperti peningkatan pengetahuan dan keterampilan petani dalam pengelolaan hutan dan lahan yang produktif dan berkelanjutan, membuka dan memperluas jaringan pasar untuk HHBK dan kebun campur, dan penguatan kapasitas BUMDes dan Kelompok Tani, akan dituangkan dalam dokumen RTHD dalam areal hutan desa dan RDK-KT untuk lahan di luar areal hutan desa. Lebih jauh rencana pengelolaan hutan dan lahan akan dituangkan dalam dokumen RTR Desa yang diintegrasikan dengan kebijakan program pemerintah yang kolaboratif. Dokumen RTR-Desa adalah dokumen yang dihasilkan dalam proyek ini, memuat tentang tata guna lahan di Desa Pattaneteang. Dokumen RTR-Desa diintegrasikan dengan dokumen RPJMDes sebagai acuan pembangunan desa yang pelaksanaannya dibahas setiap tahun melalui Musrenbang. Strategi yang digunakan untuk mendorong keterlibatan instansi terkait pada level kabupaten maupun di atasnya, adalah melibatkan instansi tersebut sejak awal dan melakukan diseminasi hasil pada akhir proyek untuk mengikat komitmen para pihak.

Lampiran: *Logical Framework Analysis*

Pastikan bahwa pernyataan Judul, Tujuan Proyek, Keluaran, dan Aktivitas sama seperti yang tertulis dalam badan Proposal.

**Judul proyek:**

Meningkatkan layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati di kawasan hutan lindung Lompobattang

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
<p><b>Goal</b> (tujuan jangka panjang): Meningkatnya layanan ekosistem dan keanekaragaman hayati di kawasan hutan lindung Lompobattang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Debit mata air utama yang dimanfaatkan oleh masyarakat setempat dan berada di sekitar hutan desa mengalami peningkatan 5% setelah 5 tahun pelaksanaan project.</li> <li>• Pendapatan dari minimal 30% anggota masing-masing kelompok meningkat minimal sebesar 10% setelah 5 tahun pelaksanaan project.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan Ground check</li> <li>• Laporan akhir project</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Apabila implementasi Rencana Tata Ruang _ Desa (RTR_Desa) pasca project tidak didukung oleh para pihak yang berkepentingan</li> </ul>
<p><b>Objective/outcome</b> Tidak bertambah tekanan lahan pertanian dalam kawasan Hutan Desa Pattaneteang di KBA Karaeng Lompobattang.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Pembukaan lahan pertanian dalam kawasan Hutan Desa tidak bertambah</li> <li>• Implementasi RTHD selaras dengan RKHD</li> <li>• Implementasi RTHD dan RDK-KT terintegrasi dengan RTR Desa.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan ground check</li> <li>• Laporan kegiatan fasilitator atau pendamping desa.</li> <li>• Laporan implementasi RTHD dari BUMDes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Jika BUMDes selaku pemegang Hak Pengelolaan Hutan Desa tidak didukung oleh para pihak terkait untuk mendukung kesadaran para perambah untuk menghentikan aktivitas penanaman cengkeh dalam kawasan hutan desa</li> </ul>

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
<p><b>Output 1:</b> Pembukaan lahan pertanian dalam kawasan Hutan Desa tidak bertambah</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya kesepakatan antara BUMDes dan masyarakat perambah tentang tata guna lahan dan pembatasan perambahan, paling lambat pada bulan ke VI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen hasil kesepakatan Dokumentasi kegiatan (photo/notulensi) Daftar hadir</li> <li>• Laporan (konsep &amp; implementasi, hasil, evaluasi, &amp; RTL) proses penguatan kapasitas kelompok tani dalam pelestarian KBA (pemetaan, lokakarya, pelatihan budidaya)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
<p>1.1 Pelatihan pemetaan tata guna lahan lahan garapan kelompok tani</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2 kali pelaksanaan pelatihan pemetaan dilaksanakan di tingkat desa pada bulan II, dengan melibatkan 3 orang perwakilan dari 17 Kelompok Tani,</li> <li>• Terbentuk Tim Pemetaan partisipatif sebanyak 17 tim pemetaan partisipatif yang</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> <li>• Laporan aktivitas pelatihan pemetaan tata guna lahan garapan petani (foto/notulensi, daftar hadir, daftar nama tim pemetaan)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
	<p>akan bertugas untuk masing-masing kelompoknya.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tim pelaksana pemetaan pada masing-masing kelompok memahami aspek teknis dan substansi dari kegiatan pemetaan.</li> </ul>		
1.2 Pembekalan tim BUMDes untuk pemetaan tata guna lahan dalam kawasan Hutan Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksana 1 pertemuan yang melibatkan 4 orang anggota BUMDes dan 1 orang Pemdes untuk menyepakati aspek-aspek yang perlu dipetakan, paling lambat pada bulan kedua.</li> <li>• Adanya Rencana kerja pemetaan tata guna lahan.</li> </ul>	Laporan aktivitas Pembekalan BUMDes untuk pemetaan tata guna lahan dalam kawasan Hutan Desa (foto/ notulensi, daftar hadir, peta hasil pemetaan areal garapan kelompok tani)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
1.3 Pemetaan tata guna lahan (dalam dan luar kawasan hutan)	<ul style="list-style-type: none"> <li>• area kawasan Hutan Desa dan area lahan pertanian dalam kawasan hutan dan lahan garapan di luar kawasan Hutan Desa terpetakan pada bulan III dengan melibatkan tim pemetaan masing-masing</li> <li>• SKPD terkait (Bappeda atau Dinas Kehutanan) terlibat dalam kegiatan pemetaan .</li> </ul>	Laporan aktivitas Pemetaan tata guna lahan (dalam dan luar kawasan hutan (foto/peta pemetaan partisipatif Hutan Desa)	

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
1.4 Lokakarya hasil pemetaan tata guna lahan dan rencana tata guna lahan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Peta tata ruang desa (yang mencakupi kawasan HD) disepakati oleh seluruh stakeholder di desa, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan desa-desa yang berbatasan.</li> <li>• Lokakarya terlaksana dengan menghadirkan 30 orang terdiri dari unsur pemerintah desa Pattaneteang, pemerintah desa yang berbatasan dengan Desa Pattaneteang, kelompok tani, Bappeda, Dinas Pertanian, Dinas Kehutanan dan BUMDes paling lambat pada bulan IV.</li> </ul>	Laporan aktivitas Lokakarya hasil pemetaan dan rencana tata guna lahan (foto/notulensi, daftar hadir, peta rencana tata guna lahan)	
<b>Out Put 2</b> Pengembangan mata pencaharian masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya inisiatif yang berkaitan dengan praktek intensifikasi lahan dimulai pada bulan ke V-VI</li> <li>• Meningkatkan pemahaman masyarakat dalam memasarkan produk kopi dan cengkeh</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• laporan tematik penguatan kapasitas dalam penghidupan berkelanjutan (konsep, implementasi &amp; hasil, evaluasi, RTL)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• sulitnya mengubah secara cepat pemahaman masyarakat terkait pengelolaan lahan yang berdasar pada pelayanan ekosistem terpadu</li> </ul>
2.1 Pengembangan pola pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Assesment peluang pengembangan intensifikasi</li> </ul>	Laporan aktivitas Pengembangan pola pertanian	

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
melalui intensifikasi lahan pertanian	<p>lahan pertanian, terlaksana bulan V pada 17 kelompok tani.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Adanya rekomendasi tentang jenis dan model intensifikasi lahan yang cocok untuk diimplementasikan, paling lambat pada bulan V.</li> </ul>	berkelanjutan melalui intensifikasi lahan pertanian (foto, daftar hadir, rekomendasi model intensifikasi)	
2.2 Penerapan pembelajaran petani melalui Sekolah Lapang dan demplot percontohan pertanian berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tersedia satu demplot untuk masing masing tiga dusun di desa pada bulan bulan VI dengan melibatkan maksimal 30 anggota kelompok tani</li> </ul>	Laporan aktivitas Penerapan pembelajaran petani melalui Sekolah Lapang dan demplot percontohan pertanian berkelanjutan (foto kegiatan dan foto demplot, daftar hadir, ToR)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>
2.3 Pelatihan pemasaran produk olahan Kopi dan Madu	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksana pelatihan pemasaran selama 2 hari dengan melibatkan 15 orang dari unsur kelompok tani dan BUMDes pada bulan VII</li> <li>• Peserta pelatihan memiliki keterampilan untuk meningkatkan nilai tambah produk kopi dan madu melalui pengemasan yang lebih baik dan pemsarannya.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan pelaksanaan pelatihan pengelolaan kopi dan madu yang dilengkapi daftar hadir dan foto kegiatan.</li> <li>• Notulensi kegiatan</li> </ul>	

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
<p><b>Output 3</b> Meningkatnya kapasitas BUMDes dan Kelompok Tani dalam menyusun dan mengimplemetasikan RTHD dan RDK-KT.</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• BUMDes dan Kelompok Tani mampu merencanakan, menyusun dan mengimplementasikan RDK-KT dan RTHD pada bulan ke V-VI</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RTHD BUMDes</li> <li>• Dokumen RDK-KT</li> <li>• Dokumen draft RTR-Desa</li> <li>• Dokumen kebijakan program para pihak terkait</li> <li>• Laporan akhir (konsep &amp; impelementasi, hasil, evaluasi &amp; RTL) proses asistensi BUMDes</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ego sektoral para pihak dalam mengimplementasikan RTR-Desa</li> </ul>
<b>Aktivitas:</b>			
3.1 Penyusunan RDK-KT disusun di 17 kelompok tani	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RDK-KT area konservasi dan area produksi tersusun pada bulan ke V, dilaksanakan 17 kali dengan target pelibatan peserta 170 orang dari 17 Kelompok Tani.</li> </ul>	Laporan aktivitas Penyusunan RDK-KT di 17 kelompok tani (foto/ notulensi, daftar hadir, dokumen RDK-KT)	•
3.2 BUMDes bersama Pemerintah Desa dan masyarakat menyusun RTHD	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dokumen RTHD BUMDes tersusun pada bulan ke VI</li> <li>• Terlaksana penyusunan RTHD BUMDes selama 5 hari dengan melibatkan 15 orang yang terdiri dari unsur pemerintah desa, BUMDes dan masyarakat.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Laporan aktivitas Penyusunan RTHD oleh BUMDes dan Pemerintah Desa (foto/ notulensi, daftar hadir, dokumen RTHD, ToR)</li> </ul>	•
3.3 Konsultasi dan Penyusunan RTR-Desa	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Draft Dokumen RTR Desa yang selaras dengan RTHD dan</li> </ul>	Laporan aktivitas Konsultasi dan Penyusunan RTR-Desa	•

	Indikator	Verifikasi	Asumsi
yang mengacu pada RTHD dan RDK-KT	<p>RDK-KT disusun dan disepakati di level desa terdiri dari unsur kelompok tani, BUMDes dan Pemerintah Desa pada bulan ke X</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Terlaksana konsultasi 1 kali dan penyusunan RTR-Desa 4 kali</li> </ul>	yang mengacu pada RTHD dan RDK-KT (foto/ notulensi, daftar hadir, draft RTR-Desa)	
3.4 Presentasi ke para pihak	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Para pihak mengetahui, memahami dan memberikan respon untuk memberikan dukungan pelaksanaan RTR-Desa selanjutnya, pada bulan ke X-XI.</li> <li>• Konsultasi dilakukan masing-masing 2 kali pada SKPD terkait.</li> </ul>	Laporan aktivitas Presentasi ke para pihak (foto/ notulensi, daftar hadir, dokumen kebijakan program para pihak)	<ul style="list-style-type: none"> <li>•</li> </ul>